

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu indikator penting dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan harmonis, sehat dan sejahtera. Semakin tinggi kepedulian tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah Hak Asasi Manusia tiap WNI seperti yang dituangkan dalam Pasal 28 H UUD Negara RI 1945. Maka dari itu, pemerintah, negara, dan segenap pejabat kepentingan memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik, supaya lingkungan hidup Indonesia terus dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat Indonesia beserta makhluk hidup lainnya. (NURPITASARI, 2016, hal. 1)

Manusia masih sering mengabaikan dan kurang peka terkait memperhatikan kondisi lingkungan dengan baik. Mengingat tentang betapa pentingnya peran lingkungan dalam kehidupan manusia, maka pemerintah menuangkan ke dalam UU No. 32 Thn. 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dijelaskan bila pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu usaha terpadu yang tersusun dan dilakukan guna sebagai bentuk dalam pencegahan terhadap potensi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup sekaligus dalam menjaga kelestarian fungsi ekologisnya. Langkah tersebut meliputi aspek penegakan hukum, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan

pemeliharaan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan. (Nina Herlina, 2017, hal.1)

Sebagaimana yang telah diketahui, sampah merupakan permasalahan yang masih belum berujung sampai sekarang. Ketidakpatuhan terhadap kebersihan tentu akan melahirkan suasana yang tidak enak yang merupakan imbas dari timbunan sampah. Tidak hanya itu, kondisi lainnya seperti banyak lalat beterbangan, gangguan dari beragam penyakit serta bau yang tidak enak. Kemungkinan dalam pencemaran lingkungan beserta turunnya kualitas keindahan dan kesehatan pun juga dapat memperburuk kehidupan masyarakat. Sehingga, sangat penting menjaga kebersihan sampah guna menghindari dampak buruk dari permasalahan sampah yang ditimbulkan.

Salah satu tantangan yang perlu segera dituntaskan di Indonesia yaitu problematika terkait sampah. Sampah muncul akibat dari kegiatan yang manusia lakukan, adanya peningkatan volume bersamaan dengan meningkatnya tingkat konsumsi, kemajuan teknologi serta populasi penduduk. Total populasi penduduk yang menyentuh angka sekitar 261 juta jiwa ikut terlibat dalam memberi timbunan sampah yang telah mencapai 65 juta ton per tahun (Badan Pusat Statistik, 5:2018). Meningkatnya timbunan sampah berkaitan pula dengan proyeksi penduduk yang meningkat. Terdapat 17.000 pulau yang ada di Indonesia yang menjadikannya negara dengan kepulauan terbesar di dunia.

Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar ketiga dan merupakan negara terbesar kedua setelah Brazil dengan biodeversitas. Akan tetapi dibalik kelimpahan kekayaan alam ini, masih banyak masalah lingkungan

hidup yang cukup parah terjadi di Indonesia. Salah satunya, Indonesia termasuk kedalam salah satu di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbesar (Kompas.com, 2020).

Bersumber pada publikasi dari televisi nasional, pada tahun 2018, merujuk pada temuan yang disampaikan oleh Jenna Jambeck, seorang peneliti bidang persampahan dari University of Georgia mengatakan bahwa negara dengan penyumbang sampah terbesar kedua salah satunya sampah plastik dengan volume sebesar 187,2 juta ton per tahun yaitu negara Indonesia, posisi pertama merupakan negara China dengan 262,9 juta ton pertahun serta kemudian diikuti negara Vietnam, Sri Lanka dan Filipina. Dari jumlah tersebut Indonesia dianggap menghasilkan 175.000 ton perhari atau sekitar 0,7 kg per orang setiap harinya (Putu, 2020, hal.28).

Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi sampah sekitar 66 hingga 67 juta ton dengan sampah organik menyentuh sekitar 60 persen serta sampah plastik berkisar 15 persen. Indonesia juga mempunyai jumlah populasi pada area pesisir yang mencapai 187,2 juta dengan setiap tahunnya menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar yang tidak tertangani secara optimal yakni mencapai 3,22 juta ton menurut data pada tahun 2018 oleh *The World Bank*, kini sampah tidak hanya mencemari bahkan mengotori lingkungan darat, namun menjadi permasalahan besar di laut pula. Maka dari itu pengurangan sampah sangat perlu dilakukan beserta pengelolaannya agar tidak mencemari daratan dan lautan. Pencegahan sampah yang semakin meningkat dan memburuk ini dapat dimulai dari setiap individu masyarakat.

Bahan yang sering digunakan dan ditemukan dengan mudah adalah plastik karena dalam kehidupan manusia dianggap berguna karena fungsinya yang bisa digunakan sebagai kantong kresek untuk membawa barang belanja, salah satunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Plastik sendiri memiliki sifat yang bersih, praktis, kedap air dan sangat memudahkan. Namun, yang sering dilupakan adalah adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan plastik apabila sudah tidak terpakai, dampak buruk ini akan langsung berdampak bagi lingkungan.

Penggunaan plastik juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Jumlah sampah plastik kini semakin meningkat, hal ini juga berdampak pada pencemaran lingkungan, hal ini disebabkan oleh akumulasi sampah plastik yang berdampak negative terhadap lingkungan, mengingat sifatnya yang tidak dapat terurai secara alami (non-biodegradable). Meningkatnya penggunaan kantong plastik didalam keseharian manusia tentu menandakan bahwa tingkat ketergantungan manusia pada penggunaan plastik juga semakin meninggi. Sayangnya, dibalik kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaan plastik sebagai kantong atau bahan pembungkus dalam kehidupan manusia, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seberapa bahayanya yang dapat kantong plastik ini timbulkan dan cara penggunaan yang benar itu seperti apa.

Tidak hanya mengganggu keindahan pemandangan pada lingkungan sekitar, plastik juga menimbulkan beberapa masalah lainnya yang lebih serius seperti terdapat resiko yang ditimbulkan dari plastik untuk memindahkan senyawa atau campuran beracun pada ekosistem yang dapat mengganggu kehidupan mahluk

hidup didalamnya karena kandungan plastik yang terhisap oleh mereka. Untuk membuang atau menghancurkan sampah plastik, masyarakat sendiri telah melakukan berbagai macam upaya seperti menguburnya didalam tanah atau dengan dibakar, namun usaha ini justru malah memperburuk keadaan karena adanya gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran, munculnya plastik ke permukaan setelah ditimbun serta adanya penyumbatan pada aliran air (Septiani, Arianie, Risman, Handayani, & Kawuryan, 2019, hal. 91).

Berdasarkan informasi dan data yang dikeluarkan tahun 2023 dan dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi dengan populasi penduduk sebesar 37.540.962 jiwa yang terletak di pulau Jawa. Meskipun provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, provinsi ini dihadapkan pula pada permasalahan serius yang belum terselesaikan yakni akumulasi sampah plastik yang sulit terurai secara alami.



Gambar 1. 1 Infografis 5 Provinsi Terpadat di Indonesia

Sumber: iNews.id

Di kota Semarang yang merupakan daerah perkotaan yang padat penduduk tentu permasalahan sampah plastik menjadi perhatian pemerintah karena kota ini memiliki jumlah jiwa penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa (BPS Jateng, 2023). World Bank dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengungkapkan bahwa, diantara 5 kota besar penyumbang sampah plastik di laut bagian barat

Indonesia salah satunya adalah Semarang. Sampah kota yang tidak tertangani memiliki total sekitar 17 – 22% dari keseluruhan total sampah. Total sampah diperkirakan mencapai 1.270 hingga 1.388 ton per hari, dimana 76,5% sekitar 965 hingga 1.054 ton dibuang di Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang. Apabila pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir ini terus menerus dilakukan maka akan meningkatkan beban lingkungan karena kekurangannya lahan dalam membuang limbah di Kota Semarang.

Adanya keterbatasan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir menjadi faktor pendorong Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat pengurangan sampah pada rantai pasokan pengelolaan sampah dengan mendorong ekonomi sirkular serta melalui pemilahan sumber. Target dalam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah (Jakstrada) Kota Semarang menetapkan pencapaian seratuspersen cakupan layanan persampahan pada tahun 2025, yang terdiri dari 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah. Dalam mendukung realisasi target tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengupayakan peningkatan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga melalui penguatan peran Bank Sampah serta pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Arwita Mawarti, menyatakan bahwa jumlah timbunan sampah di Kota Semarang saat ini telah mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang merencanakan pengolahan sampah tersebut menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Arwita menambahkan bahwa kapasitas

energi listrik yang ditargetkan dari proses pengolahan tersebut berkisar antara 15 hingga 18 megawatt (MW). Kemudian, ia menjelaskan bahwa estimasi nilai investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan pengolahan sampah tersebut mencapai Rp2,6 triliun. Adapun kebutuhan lahan diperkirakan seluas kurang lebih 11 hektar (ha), dengan biaya operasional pengolahan sampah (tipping fee) yang diperkirakan mencapai Rp230 miliar per tahun. Skema pembiayaan proyek ini dirancang melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan dukungan fiskal dari pemerintah pusat dalam bentuk *viability gap fund* (VGF) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) hingga maksimum 49 persen dari total biaya. Saat ini, Pemerintah Kota Semarang masih menunggu proses pendampingan melalui *Project Development Facility* (PDF) dari Kementerian Keuangan sebagai bagian dari tahapan persiapan proyek.

Dalam mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kantong plastik, Peraturan Walikota No 27 Thn 2019 terkait Pengendalian Penggunaan Plastik Kota Semarang pun diterapkan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa “*tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik diantaranya: menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik; melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi.*” Kemudian pada Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa “*Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: sosialisasi; konsultasi; kemitraan; pelatihan; bantuan teknis; dan fasilitas penerapan teknologi tepat guna pengendalian*

plastik.” Pada Pasal 4 mengandung bahwa pelaku usaha dan penyedia plastik meliputi hotel; restoran; rumah makan; penjual makanan; toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik atau Styrofoam dan dapat menggantinya dengan kantong alternatif ramah lingkungan. Apabila melanggar akan dikenai sanksi dengan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum untuk mendorong tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengurangan sampah plastik.

Dalam penerapan kebijakan ini diharap agar tiap masyarakat dan tiap pelaku usaha dapat mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari dengan mengganti menggunakan tas belanja ramah lingkungan dan tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanja. Di Kota Semarang pun terdapat banyak ritel yang sudah tidak menyediakan kantong plastic sebagai kantong belanja. Diantaranya telah menggunakan kantong berbayar ramah lingkungan atau kardus bekas yang telah disiapkan sebagai pengganti kantong plastic. Adapun yang telah mengharuskan membawa kantong belanja sendiri dari rumah masing-masing. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, masih ada ditemukannya pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik guna menarik ketertarikan pengunjung atau pembeli. Dalam Perwali tersebut tentu terdapat larangan bagi pelaku usaha terkait menggunakan bahkan memberi kantong plastik sebagai kantong membawa belanjaan pada masyarakat yang telah tertera jelas, namun sanksi masih belum ditegakkan dan belum diberlakukan secara tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.

Adanya kebijakan pengendalian penggunaan plastik sangat diperlukan guna dapat membiasakan hidup masyarakat dalam menciptakan perilaku hidup sehat dan ramah lingkungan. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, partisipasi pelaku usaha dan masyarakat juga belum berjalan dengan baik, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pembeli dalam mendukung kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik yang dibuktikan dengan masih adanya pembeli yang meminta kantong plastik kepada pelaku usaha.
- b. Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam mendukung kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik yang dibuktikan dengan masih adanya kantong plastik yang disiapkan untuk para pembeli dan guna meningkatkan minat para pembeli.
- c. Kebijakan Pengendalian Plastik sudah merata namun kebijakannya belum di implementasikan secara tegas walaupun yang terkandung di dalam kebijakan tersebut meliputi sanksi-sanksi yang telah disediakan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang menyiapkan kantong plastik dan tidak ada pengawasan dari Pemerintah sehingga tidak mendapatkan teguran atau sanksi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di ritel kota Semarang?
2. Apa yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di ritel Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang
2. Menganalisis terkait apa saja yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan yang relevan dengan topik penelitian
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Semarang didalam merumuskan & melaksanakan kebijakan terkait pengendalian penggunaan plastik.
- 3) Dapat memperkaya pengetahuan guna meningkatkan kepedulian serta kesadaran terhadap pentingnya kebijakan pengendalian penggunaan plastik.

- 4) Dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dasar bagi peneliti berikutnya, khususnya pada keterkaitannya dengan pengurangan penggunaan plastik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Siti Shopiatul Islami, G Goris Seran, Irma Purnamasari (2020).	Implementasi Kebijakan PERWALI Bogor No 61 Tahun 2018 Terkait Pengurangan	Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan PERWALI	Metode yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif. Dilakukan menggunakan pengumpulan data melalui melakukan	Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan kebijakan di Kota Bogor terkait pengurangan pemakaian kantong plastik tergolong baik. Disebut demikian karena dari program yang diterapkan telah berlangsung sesuai peraturan dan penurunan angka pada pemakaian

		Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor	Bogor terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.	tanya jawab kepada responden secara verbal terkait PERWALI Bogor atau dengan wawancara, kuesioner (melalui pemberian serangkaian pertanyaan secara tertulis pada responden untuk dapat menjawab), studi kepustakaan	kantong plastik yang cukup signifikan. Kebijakan peraturan yang dilaksanakan ini telah menunjukkan <i>administrative implementation</i>, maksudnya yakni rendahnya tingkat konflik yang rendah dan rendahnya tingkat ambiguitas diantara sasaran kebijakan, masyarakat pengguna dan pelaksana kebijakan. Namun, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lingkungan juga ditemukan. Pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Richard E. Matland (1995). Richard menguraikan model dan
--	--	---	--	--	--

				(yang diambil datanya dengan sumber dari dokumen, kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan tentang implementasi kebijakan itu, dan melakukan observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan	matriks dari ambiguitas-konflik implementasi kebijakan yakni: a. <i>Administrative Implementation Low Policy Ambiguity and Low Policy Conflict</i>. Kebijakan ini mempunyai kemenduaan yang rendah atau ambiguitas dan konflik yang rendah. Selain itu implementasi ini merupakan implementasi yang secara administratif ialah implementasi dalam keseharian suatu pelaksanaan operasi birokrasi pemerintah. b. <i>Political Implementation: Low Policy Ambiguity and High Policy</i>
--	--	--	--	--	--

				langsung dilokasi penelitian.	<i>Conflict</i>. Yakni merupakan pengimplementasian secara politik yang perlu dipaksa secara politik pula sebab tingginya tingkat konflik dan rendahnya tingkat ambiguitasnya. c. <i>Experimental Implementation</i>: <i>High Policy Ambiguity and Low Policy Conflict</i> . Yakni merupakan melakukan pengimplementasian secara eksperimental pada kebijakan yang mendua dengan rendahnya tingkat konflik. Dilakukannya implementasi ini pada kebijakan yang memiliki
--	--	--	--	--------------------------------------	---

					tingginya tingkat ambiguitas dan rendahnya tingkat konflik. d. <i>Symbolic Implementation:</i> High Policy Ambiguity and High Policy Conflict. Yakni merupakan pengimplementasian secara simbolik yang dilakukan pada kebijakan dengan tingginya tingkat ambiguitas dan tingginya tingkat konflik. Disini kebijakan memiliki tingkat tinggi yang sama antara konflik dan ambiguitas.
--	--	--	--	--	---

2.	Gumgum Gumelar (2018).	Persuasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik melalui Narasi dan Persepsi Resiko	Penelitian ini memiliki tujuan terka it resiko yang dimediasi oleh keterhanyutan, apakah persuasi narasi dalam tipe pesan mampu mengurangi penggunaan kantong plastik.	Dalam penelitian berikut menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan pemberian manipulasi berupa bahan bacaan, serta pengisian tiga jenis skala oleh 167 responden	Hasil penelitian yang didapat adalah resiko kesehatan dapat mampu meningkatkan sikap yang cenderung lebih ramah lingkungan berupa pengurangan pemakaian kantong plastik dibanding dari jenis pesan dengan resiko lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya proses keterhanyutan sehingga dalam penelitian ini tentu telah memberi peran serta salah satunya literasi masyarakat terkait pengurangan pemakaian kantong plastik yang bisa meningkatkan kepribadian yang ramah lingkungan. Dalam penelitian inipeneliti menggunakan teori
----	------------------------------	--	---	---	--

					keterhanyutan dalam narasi dengan mendeskripsikan terkait pemrosesan narasi dapat berpengaruh pada sikap, keyakinan, evaluasi dunia dari protagonist dan narasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan konsisten dengan penerapan teori keterhanyutan sehingga menunjukkan hasil penelitian yang partisipannya memiliki lebih sedikit <i>counterarguments</i> ketika sedang berada dalam keterhanyutan yang lebih besar.
3.	Berliana Anggun	Pengelolaan Sampah	Tujuan yang dimiliki dalam	Metode yang digunakan oleh	Temuan dalam penelitian ini yakni di Kota Salatiga, pengelolaan sampah plastik

Septiani, Dian Mita Arianie, Via Fide Aditya Andi Risman, Widhi Handayani, Istiarsi Saptuti Sri Kawuryan (2019).	Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan	penelitian ini adalah yaitu guna mendeskripsikan pengelolaan sampah plastik terutama pada sistemnya di Kota Salatiga berlandaskan peran dari seluruh pihak yang berpartisipasi	peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data yang didapat dari literature pendukung dan wawancara mendalam serta teknik observasi.	mengikutsertakan 4 pihak yakni pemerintah berperan sebagai pengelola sampah kota Salatiga, pengepul dan bank sampah sebagai pengolah sampah plastik, pemulung sebagai agen pemilah sampah, dan rumah tangga sebagai penghasil sampah. Di Salatiga, upaya dalam pengolahan sampahnya diarahkan pada sistem mengumpulkan, mengangkut, membuang, mengolah dan menimbun. Dalam mengurangi penggunaan plastik masih perlu berhadapan dengan aspek sosial-budaya masyarakat yang tidak bisa terlepas dari ketergantungannya
---	---	---	---	--

			dalam pengelolaan sampah plastik.		menggunakan plastik, selain perlu adanya kesadaran lingkungan yang perlu ditanamkan. Salah satu yang paling penting juga dari peran pemerintah dalam mengedukasi dan memberi pemahaman bagi masyarakat dalam mengurangi perilaku menyampah dan memilah sampah terlebih dahulu, mengelola pengepul dan pemulung, meningkatkan kapasitas operasional Bank Sampah, mengelola limbah residu yang tidak dapat ditangani oleh pengepul maupun Bank Sampah, serta membangun kolaborasi antar keduanya.
--	--	--	--	--	--

4.	Nazaruddin Lathif (2019).	Kewenangan Penyelenggara Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor	Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang dikeluarkannya PERWALI Bogor No 61 Thn 2018 tentang	Dalam penelitian berikut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti	Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor memiliki peran dan kewenangan dalam menjamin keberlangsungan program pengurangan penggunaan kantong plastik yakni menetapkan strategis partisipasi masyarakat dan kebijakan dalam pengurangan pemakaian kantong plastik, pengawasan, evaluasi secara periodic, dan pembinaan pada penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha, toko

			Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik.		modern, pusat perbelanjaan, atau yang menjadi konsumen yakni masyarakat.
5.	I Gede Druvananda Abhiseka (2019).	Implementasi Peraturan Walikota Denpasar No 36 Thn 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik	Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum yang dapat ditempuh pemerintah dalam memaksimalkan penerapan PERWALI	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah hukum empiris yakni dilakukan dengan melakukan penelitian dengan bahan pustaka yang ada dapat berupa peraturan perundang- undangan dan	Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa penerapan PERWALI di pasar tradisional masih sangat kurang, sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih bijak dan tegas dalam mengurus dan mengatur terkait pengurangan sampah plastik yang ada.

			serta memahami implementasi hukum pada PERWALI bagi pelaku usaha di pasar tradisional.	melakukan penelitian pada masalah hukum.	
6.	Ellisa Vikalista (2018).	Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin No 18 Tahun 2016 terkait	Penulisan penelitian inipun memiliki tujuan yaitu mempelajari sejauh mana penerapan Dinas Lingkungan	Metode penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan dilakukan melalui teknik wawancara ,	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini terkait implementasi kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik dinilai sudah cukup teratasi. Komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sudah dilakukan cukup maksimal, namun masyarakat masih belum terlalu memahami dampak dari sampah

		Pengurangan Pemakaian Kantong Plastic	Hidup Kota Banjarmasin terkait implementasi kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, akibat volume plastik sampah yang terus bertambah setiap tahun.	observasi dan dokumentasi, studi lapangan dan studi pustaka.	plastik karena aparaturnya memiliki sumber daya yang sedikit dalam menjalankan penerapannya. Struktur birokrasi pun telah dijalankan dan tertata dengan baik pula, namun nyatanya masih ada aparat yang harus berkeja keras dalam melakukan pengawasan sehingga menghimbau masyarakat kota Banjarmasin untuk ikut berperan serta membantu pengawasan dalam penerapan kebijakan ini. Serta masyarakat harus mendukung dalam keberlangsungan penerapan kebijakan ini agar dapat berjalan dengan baik. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah
--	--	---	---	--	---

					penelitian adalah dari Edward III, yang terdiri dari empat komponen yang memiliki pengaruh pada implementasi kebijakan. Keempatnya adalah sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi. Faktor komunikasi menurut teori George C. Edward III terdiri dari 3 subkomponen komunikasi yang dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan yakni kejelasan persoalan, konsistensi dan sosialisasi. Pada faktor sumber daya, faktor ini menjadi kebutuhan utama supaya dapat terwujudnya tujuan kebijakan pemerintah karena kualitas dari sumber daya itu yang
--	--	--	--	--	--

					akan menentukan pencapaian tujuan pemerintah. Kemudian pada faktor disposisi, memiliki makna sebagai keinginan atau kesepakatan serta sebagai sikap kecenderungan pelaksana untuk menjalankan suatu kebijakan. Sehingga disposisi memiliki karakteristik yang menempel kuat dengan pengelola kebijakan. Sedangkan pada faktor struktur birokrasi, meliputi beberapa hal penting seperti mekanisme yang berkaitan dengan hubungan antar unit organisasi secara diagonal, vertical ataupun horizontal,
--	--	--	--	--	---

					pembagian kewenangan serta struktur organisasi SOP.
7.	Budi Setiawan dan Dini Salmiyah F. (2018).	Kampanye Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam Membentuk Persepsi Masyarakat Bandung	Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengamati strategi yang digunakan dalam program Kampanye Rampok Plastik serta mengusut dengan teori	Dalam penelitian berikut menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara.	Sehingga pada penelitian ini, hasilnya pun menunjukkan adanya persepsi yang perlu dibentuk seperti adanya kesadaran pada masyarakat akan dampak negative dari pemakaian kantong plastik dan adanya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik masih belum dilakukan evaluasi secara komprehensif. Pada penelitian ini memakai teori dari Jalaluddin Rakhmat yakni teori Pembentukan Persepsi.

			proses <i>public relations</i> yang dimulai dari mendeskripsikan masalah, adanya perencanaan, bertindak dan kemudian mengevaluasi program.		
8.	Laode Muhamad Fathun, I Nyoman Aji	Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis	Peneliti menggunakan tahapan penelitian kualitatif deskripsi	Hasil penelitian nya yakni pada wilayah Pandeglang, pengelolaan limbahnya masih belum menjadi kepentingan utama atau prioritas bagi

	Suadhana Ray (2019).	Keamanan Maritim di Indonesia diKabupaten Pandeglang	terkait masalah pada keamanan maritim salah satunya yakni pengelolaan limbah laut.	yang memakai metode studi kasus. Dalam penelitian inipun melakukan pengamatan langsung dan observasi di wilayah objek penelitian. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik melakukan wawancara dan memakai data dari	pemerintah. Karena pemerintah sendiri masih menaruh focus pada masalah lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan sampai pada tahun 2020 dan telah dituliskan dalam rencana strategis regional. Sehingga kendala yang diperoleh dalam pengelolaan limbah yaitu adanya sumber daya, masalah pada budaya dan ekonomi serta masalah pada orientasi kebijakan.
--	---------------------------------	---	---	---	---

				buku, internet dan jurnal.	
9.	Junaidy Inas (2020)	Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kota	Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna menganalisis dan mengamati penelitian dengan membahas hasil data yang telah didapatkan melalui teori implementasi	Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara dan observasi.	Hasil yang telah ditemukan dalam penelitian ini terkait implementasi kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik telah terlaksana dengan relative optimal serta sejalan dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada aspek komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui elektronik dan media cetak serta melakukan konseling secara langsung pada pihak kepentingan yang bersangkutan. Pada aspek sumberdaya program diet kantong plastik telah

		Banjarmasin Tahun 2019	kebijakan publik yang telah dijelaskan.		didukung oleh relawan dan aparatur namun pada aspek pendanaan masih perlu ditingkatkan secara serentak. Pada aspek disposisi, aparatur pelaksana melakukan prosedur secara konsisten. Terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan kebijakan yang bersifat normative ini seperti kurangnya pengawasan dan tidak adanya pembinaan lebih lanjut dari pemerintah kota Banjarmasin pada pelaku usaha ritel, serta tidak adanya sanksi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Banjarmasin, baik itu pembinaan maupun penegakan dapat dibilang belum ada dan
--	--	---------------------------	---	--	--

					belum tersedia. Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni dengan teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) yang meliputi empat komponen yang merupakan salah satu pembuat keberhasilan implementasi kebijakan publik yakni terdiri dari struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi dan disposisi
10.	Bhakti Nur Avianto (2020).	Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis	Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif yang akan	Sehingga hasil penelitian yang ditunjukkan adalah dari Peraturan Walikota Bogor No 61 Thn 2018 terkait Pengurangan Sampah Plastik dan

		61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik dengan Studi Kasus di Mall Wilayah Utara Kota Bogor	terkait penerapan peraturan walikota yang diterapkan di Kota Bogor.	memaparkan analisis kebijakan publik dalam melaksanakan peraturan pemerintah terkait pengurangan pemakaian kantong plastik. Teknik yang digunakan adala <i>survey etnografi.</i>	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Thn 2012 terkait Penggunaan Plastik Biodegradable masih meretas beragam permasalahan pemakaian plastik residu untuk bahan pada makanan siap saji, penyuluhan penggunaan plastik satu kali pakai yang belum dijalankan dengan maksimal yang ditunjukkan 1,2% belum mengetahui adanya program kantong plastik; 7,7% belum ada pengganti alternative dari kantong plastik; 9,7% belum ada penyuluhan; 20,4% telah mengetahui diet plastik; 31,5% setuju namun masih belum
--	--	---	---	--	---

					dapat terbiasa; dan sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lainnya.
--	--	--	--	--	--

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik berdasarkan temuan dari Caiden merupakan fungsi dari perumusan sasaran dan tujuan, perencanaan, pembuatan keputusan, penggalangan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan organisasi kemasyarakatan guna mendapatkan dana bagi program pemerintah dan mendapatkan dukungan dari rakyat, pengawasan dan pengerahan pegawai, adanya perubahan dan pemantapan organisasi, komunikasi, kepemimpinan, pengendalian dan lainnya yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintahan. Menurut Pasolong, administrasi publik merupakan suatu bentuk kerja sama antara lembaga atau sekelompok orang dalam menjalankan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Chandler dan Plano menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses di mana personel publik & sumber daya di tata dan dikoordinasikan guna merumuskan, mengaplikasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Maka dari itu administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi publik yang bekerja sama secara rasional guna mencapai tujuan publik. Secara luas, dapat disimpulkan pula sebagai sekelompok orang yang bekerja sama yang menyatu dalam organisasi publik yang melakukan kegiatan guna meraih tujuan publik yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan melakukan pengawasan pada sarana prasarana dan orang, perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. (Revida, 2020, hal 3-9).

Adapun di dalam ilmu administrasi publik yang dikenal dengan focus sebagai apa yang akan dikaji dan *locus* yang merupakan dimana tempatnya. Maka,

dalam administrasi publik terdapat timbulnya pergeseran paradigma, yakni sebagai berikut:

1. Paradigma I: Dikotomi Politik-Administrasi Publik (1900-1926)

Leonard D White merupakan sosok pelopor dari paradigma pertama. Administrasi dan politik merupakan dwifungsi dari paradigma dengan pembagian yang berlawanan dari politik-administrasi. Administrasi publik bekerja setelah politik merumuskan kebijakan merupakan lokus dari administrasi publik. Sementara focus administrasi publik berada pada naungan politik. Administrasi publik merupakan perpanjangan tangan politik ketika menjalankan suatu kebijakan yang telah politik rumuskan. Dalam paradigma ini terdapat hubungan politik dan administrasi yang dapat dimaknai seperti dua sisi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

2. Paradigma II: Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Sosok pelopor dalam paradigma kedua ini merupakan FW Taylor. Diikuti dengan adanya 4 prinsip dasar administrasi publik yaitu; kerjasama yang kuat antara pegawai dan atasan serta pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah, perlunya mengembangkan ilmu manajemen sejati guna memperoleh kinerja terbaik, melakukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka dapat bertanggung jawab. Kemudian Henry Fayol, Leonard D White dan lainnya mengembangkan prinsip ini. Locus administrasi bukan menjadi persoalan di dalam paradigma ke II ini. Karena pada paradigma II lebih menekankan focus administrasi publik yaitu perlunya menerapkan prinsip administrasi seperti koordinasi, kerja sama, disiplin, produktivitas, efisiensi, efektivitas dan lain sebagainya.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sosok tokoh pada paradigma ini adalah Chester I Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon dan lainnya. Paradigma III merupakan bagian dari ilmu politik. Administrasi publik berperan sebagai eksekutif dari politik serta pelaksanaan administrasi publik dapat diintervensi oleh lingkungan publik dan tidak bisa bebas nilai (*free value*).

4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Sosok tokoh yang menjadi pelopor dalam paradigma ini adalah Herbert Simon, Keith Henderson, dan James March. Pada paradigma IV ini focus administrasi publik hanya menerapkan teori-teori organisasi, dan ilmu manajemen. Tidak ada perbedaan focus administrasi publik dan administrasi bisnis dalam paradigma ini, keduanya berfokus pada produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Sosok tokoh dalam paradigma ini yaitu Amitai Etzioni, Gerald Caiden dan lainnya. Pada paradigma ini, administrasi publik tetap menjadi administrasi publik dengan berjalannya prinsip dan fungsi administrasi publik. Manajemen publik dan teori organisasi, politik ekonomi publik, proses pembuatan dan analisis kebijakan publik pun digunakan di dalam paradigma ini.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik melibatkan banyak pihak dan dalam kebijakan publik menjadi isu sentral bagi banyak pihak, dapat secara tidak langsung ataupun secara

langsung dalam proses perumusan, implementasi dan dalam proses evaluasi daripada implementasinya. Definisi menurut Carl J Frederick seperti yang diikuti oleh Leo Agustino, kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang diusulkan pemerintah, kelompok atau seseorang dalam lingkungan tertentu yang terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ide kebijakan juga perlu melibatkan perilaku yang memiliki tujuan dan maksud penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan wajib dapat menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Sedangkan merumuskan kebijaksanaan menurut Anderson dianggap sebagai langkah tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh sejumlah atau seorang aktor yang berkaitan dengan adanya persoalan yang dihadapi (Abdul Wahab, 1997:3).

Seorang ahli bernama S. Abdul Wahab mengungkapkan bahwa istilah kebijakan masih terdapat perbedaan pendapat dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli, maka dalam memahami istilah kebijakan, ia menguraikan kedalam beberapa pedoman yakni:

- a. Kebijakan meliputi perilaku dan harapan;
- b. Kebijakan meliputi adanya atau ketiadaan tindakan;
- c. Kebijakan wajib dibedakan dari keputusan;
- d. Kebijakan tidak serta dapat dibedakan dari administrasi;
- e. Kebijakan mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan mempunyai sasaran secara implisit atau eksplisit;

- g. Kebijakan timbul dari adanya proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan mencakup hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intraorganisasi;
- i. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif;
- j. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga pemerintah (Dewi, 2019, hal 202-203).

1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya menurut Nugroho (2014) implementasi ini adalah bagaimana suatu kebijakan memenuhi target yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan proses yang kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2014, hal. 138). Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008, hal 145) implementasi merupakan apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan kebijakan, otoritas program, suatu jenis keluaran yang nyata atau keuntungan. Istilah implementasi juga mengarah pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan pada maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah. Implementasi meliputi tindakan aktor seperti birokrat yang dimaksudkan guna membuat program berjalan. Pada prinsipnya untuk mengimplementasikan kebijakan adalah cara guna kebijakan dapat mencapai tujuan. Guna mengimplementasikan kebijakan publik dapat melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut atau secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program.

Adapun beberapa model implementasi kebijakan publik yang memiliki kelebihan dan kekurangan yakni sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Ripley dan Franklin.

Dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986: 232-233), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation*. Menurut Ripley dan Franklin terdapat tiga acara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan yakni:

- a. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*).
- b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and the absence of problem*).
- c. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*).

Ketiga cara yang dominan ini dapat dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sehingga identifikasi yang dilakukan menjadi lebih mudah (Cahyadi, Andi. Sriarti . Al Fatih, 2014, hal. 15-24).

2. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier, dimulai dari kinerja kebijakan publik, pelaksana (implementator), hingga kebijakan itu sendiri. Terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi proses implementasi kebijakan publik, antara lain komunikasi antarorganisasi dan kegiatan implementasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, karakteristik

pelaksana kebijakan, serta orientasi atau kecenderungan dari para pelaksana tersebut.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier.

Model ini disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variabel.

- a. Variabel intervening
- b. Variabel independent
- c. Variabel dependen

4. Model Implementasi Kebijakan dari Hogwood dan Gunn.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Nugroho 2009), guna mengimplementasikan kebijakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu yakni sebagai berikut:

- a. Pertama, adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana atau lembaga tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk di dalamnya sumber daya waktu.
- c. Ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang kompleks sifatnya dan multidimensional, sehingga dalam implementasinya memerlukan berbagai sumber, baik sumber daya maupun sumber aktor.
- d. Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kasual yang handal.

- e. Kelima, apakah banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah bersifat ketergantungan.
- g. Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tidak terlalu sulit ketika mereka yang ada dalam perahu yang sama memiliki tujuan yang sama pula. Namun, sebuah perahu dengan penumpang yang berbeda tujuan dan tidak adanya yang dapat memimpin merupakan perahu yang tidak pernah beranjak dari tempatnya.
- h. Kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan.
- i. Kesembilan, adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi merupakan perekat organisasi, sedangkan koordinasi merupakan prasyarat dan kerjasama tim dan terbentuknya sinergi.
- j. Kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan merupakan syarat dari efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan

otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan memiliki dampak berupa kepatuhan dari pihak yang dikenai kebijakan.

5. Model Implementasi Kebijakan dari Goggin, Bowman dan Lester.

Goggin, Bowman, dan Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang dikenal sebagai *Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan*, yang berlandaskan pada pendekatan komunikasi. Tujuan utama dari pengembangan model ini adalah menciptakan kerangka implementasi yang lebih ilmiah dengan memanfaatkan metode penelitian yang mengintegrasikan variabel independen, intervening, dan dependen. Dalam model ini, aspek komunikasi diposisikan sebagai elemen kunci yang mendorong proses implementasi kebijakan.

6. Model Implementasi Kebijakan Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan (Nugroho, 2009). Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward (dalam Nugroho, 2009) menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan strukturbirokrasi (*bureaucratic structure*).

- a. Komunikasi (*communication*)
- b. Sumber daya (*resources*)
- c. Komitmen (*disposition*)

d. Struktur birokrasi (bureaucratic structure)

7. Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood

Nakamura dan Smallwood merancang model implementasi kebijakan secara terperinci, yang diklasifikasikan ke dalam lima tipe atau kuadran, yaitu *classical technocracy*, *instructed delegation*, *bargaining*, *discretionary experimentation*, dan *bureaucratic entrepreneurship* (Nugroho, 2009).

8. Model Implementasi Kebijakan menurut Riant Nugroho

Adapun teori terkait ketepatan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2017) yang terdiri dari lima prinsip yakni:

- 1) Ketepatan kebijakan. Tepat kebijakan ini dinilai dari apakah kebijakan tersebut sudah tepat. Hal ini dinilai dengan seberapa jauh kebijakan yang ada memiliki muatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- 2) Ketepatan pelaksana. Terdapat tiga lembaga yang menjadi implementor yaitu implementasi kebijakan yang bersifat monopoli, Kerjasama antar masyarakat/swasta dengan pemerintah, dan pemerintah.
- 3) Ketepatan target. Hal ini terdiri atas apakah target tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah target diintervensi sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedua, apakah target dalam kondisi siap atau tidak untuk diintervensi. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan memiliki sifat memperbaharui implementasi dari kebijakan sebelumnya atau masih baru.

- 4) Ketepatan lingkungan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah interaksi diantara pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lembaga perumus kebijakan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah terkait persepsi publik dalam kebijakan dan implementasi kebijakan.
- 5) Ketepatan proses. Ketepatan ini terbagi dalam tiga proses yakni *strategic readiness*, *policy adoption* dan *policy acceptance*. Tepat proses merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan proses yang telah ditentukan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Semarang dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Semarang. Dasar dalam penelitian ini terkait keefektifan implementasi kebijakannya terdiri dari lima prinsip yakni:

- 1) Ketepatan kebijakan.

Tepat kebijakan ini dinilai dari apakah kebijakan tersebut sudah tepat. Hal ini dinilai dengan seberapa jauh kebijakan yang ada memiliki muatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

- 2) Ketepatan pelaksana.

Terdapat tiga lembaga yang menjadi implementor yaitu implementasi kebijakan yang bersifat monopoli, Kerjasama antar masyarakat/swasta dengan pemerintah, dan pemerintah.

3) Ketepatan target.

Hal ini terdiri atas apakah target tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah target diintervensi sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedua, apakah target dalam kondisi siap atau tidak untuk diintervensi. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan memiliki sifat memperbaharui implementasi dari kebijakan sebelumnya atau masih baru.

4) Ketepatan lingkungan.

Dalam hal ini terbagi menjadi dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah interaksi diantara pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lembaga perumus kebijakan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah terkait persepsi publik dalam kebijakan dan implemmtasi kebijakan.

5) Ketepatan proses.

Ketepatan ini terbagi dalam tiga proses yakni *strategic readiness*, *policy adoption* dan *policy acceptance*. Tepat proses merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan proses yang telah ditentukan.

Prinsip lainnya yang harus dipenuhi dalam terdiri dari tiga faktor suksesnya implementasi kebijakan yakni:

- 1) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), kinerja yang optimal serta dampak positif yang dihasilkan mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
- 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat diidentifikasi melalui berjalannya fungsi secara rutin tanpa hambatan yang berarti dalam proses implementasinya.
- 3) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai melalui sejauh mana kepatuhan terhadap substansi kebijakan sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.

1.7 Argumen Penelitian

Pada penulisan di penelitian argument yang dimiliki peneliti terkait masalah yang terjadi adalah implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Semarang belum terealisasi dengan optimal sesuai yang diharapkan. Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Semarang dinilai belum efektif karena sesuai dengan pernyataan Ripley dan Franklin bahwa dalam menganalisis implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga indikator yakni; Pertama, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Dalam hal ini program pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dikatakan masih belum berhasil karena belum dapat membawa dampak

sesuai yang diinginkan. Dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik.

Kedua, kelancaran pelaksanaan fungsi secara rutin. Implementasi kebijakan dinilai belum sepenuhnya terealisasi dengan optimal, mengingat masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dari pelaku usaha maupun masyarakat dalam mendukung upaya pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Ketiga, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Bila melihat dari tingkat kepatuhannya, para pelaku usaha masih belum mematuhi kebijakan yang telah diterapkan. Adanya para pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik sebagai kantong belanja sedangkan kebijakan terkait pengendalian penggunaan plastik terutama sebagai kantong belanja telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Diperkuat dengan adanya pernyataan dari pelaku usaha, penggunaan produk plastik sekali pakai seperti kantong plastik yang digunakan sebagai kantong belanja dinilai meningkatkan minat belanja para pembeli di toko tersebut. Sehingga dari pernyataan ini, masih ada pelaku usaha yang belum menaati dengan baik peraturan yang ada, hal ini tentu sangat dibutuhkan pemantauan aktivitas jual beli para pelaku usaha agar dapat disiplin mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui tiga indikator utama yaitu terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, kelancaran rutinitas fungsi dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pada konteks implementasi

kebijakan ini, ketiga indikator tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Dampak kebijakan masih belum sepenuhnya tercapai khususnya dalam sektor yang masih dominan menggunakan kantong plastik.

Pelaksanaan kegiatan rutin dengan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar elemen. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran lingkungan, belum tersedianya alternatif pengganti plastik yang terjangkau dan lemahnya penegakan suatu aturan. Demikian, faktor penghambat ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, namun juga bergantung pada kesiapan aktor pelaksana dan kondisi ekonomi-sosial tingkat lokal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai landasan dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini juga menggambarkan dan memaparkan semua kejadian dan keadaan yang diperoleh dalam penelitian dari lapangan, sesuai dengan isu-isu yang telah dirumuskan dalam fokus permasalahan. Salah satu penyebab penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa kata-kata, dokumen dan tulisan yang berasal dari sumber atau informan yang dapat dipercaya dan

diteliti. Maksud dari penelitian berjenis deskriptif kualitatif menurut Moleong (2005: 6) adalah suatu penelitian yang memiliki makna untuk mengetahui peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan sejenisnya dalam deskripsi yang berbentuk Bahasa dan kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan dalam konteks spesifik yang alamiah (Setiawan & Fithrah, 2018, hal. 102-117).

Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif menurut Nana S. Sukmadinata (2011:73), yakni memiliki tujuan guna menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, yang bersifat rekayasa manusia ataupun bersifat alamiah, dengan lebih menaruh perhatian pada kualitas, karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan (Frefitasari, 2016, hal. 13-22). Dengan metode yang ada pada penelitian dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk memaparkan pengertian terkait fenomena tertentu dengan mendeskripsikan fenomena tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan susunan kegiatan guna mendapatkan data sesuai apa adanya. Alasan peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menyajikan dan menganalisis data data dari hasil analisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian pada implementasi kebijakan ini dilakukan di Kota Semarang. Pemilihan Kota Semarang sebagai situs penelitian didasarkan pada beberapa

pertimbangan yang relevan dengan focus kajian. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik. Pemerintah Kota Semarang pun telah aktif mengeluarkan regulasi dan kebijakan pengendalian kantong plastik. Hal ini menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kota yang responsive terhadap isu lingkungan dan dapat dijadikan studi kasus dalam menelaah efektivitas implementasi kebijakan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi subjeknya adalah benda yang diteliti atau orang, yang dimana subjek penelitian merupakan orang yang mendapatkan masalah. Subjek penelitian menurut Moleong adalah orang yang dimanfaatkan guna memberikan informasi terkait kondisi dan situasi latar penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008, hal.188). Bila didalam pengumpulan datanya, peneliti memakai wawancara atau kuesioner, sumber datanya ialah responden yakni orang yang menjawab dan merespon segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara lisan maupun tertulis, dan apabila teknik observasi yang digunakan oleh pengkaji, lalu yang menjadi sumber datanya dapat berbentuk gerak, benda atau proses sesuatu. Berikut subjek penelitian yang ada pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- b. Pelaku usaha ritel yang ada di Kota Semarang.
- c. Masyarakat Kota Semarang.

1.8.4 Jenis Data

Data dalam penelitian ini berbentuk kualitatif dan bersifat deskriptif, disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Selain itu, data diperoleh melalui teknik pengumpulan tambahan seperti dokumentasi berupa foto, arsip, dan dokumen lain yang relevan. Jenis data lainnya yang digunakan mencakup sumber data tertulis serta data yang berasal dari tindakan atau aktivitas yang diamati.

1.8.5 Sumber Data

Disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka sumber data yang digali berasal dari data sekunder dan data primer yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dengan cara langsung pada lokasi penelitian atau dari lapangan, baik melewati hasil observasi ataupun dengan melakukan wawancara. Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pelaku usaha Kota Semarang, dan Masyarakat sebagai konsumen di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung atau di luar lokasi penelitian atau di luar lapangan yang dapat membantu data primer seperti dengan melalui internet, foto, artikel, studi pustaka, gambar, jurnal, buku dan lain-lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data mempermudah peneliti untuk dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut sehingga termasuk ke dalam bagian terpenting dalam keberlangsungan suatu penelitian. Dalam penelitian, yang menjadi tahap penting dan utama yakni merupakan teknik pengumpulan data karena dalam penelitian tujuan utamanya yakni untuk mengumpulkan data. Apabila teknik pengumpulan data tidak diketahui dan tidak dipahami, maka seharusnya peneliti tidak akan bisa mendapatkan dan menemukan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Sehingga, teknik pengumpulan data yang dipakai guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1) Observasi

Cara seperti ini yang mengharuskan melakukan pengawasan dari pengamat secara tidak langsung ataupun secara terang-terangan pada objek yang menjadi penelitiannya. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan di toko pelaku usaha Kota Semarang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu pembicaraan yang memiliki tujuan khusus dan dijalankan oleh dua bagian yakni pengaju pertanyaan adalah pewawancara dan pemberi jawaban adalah yang diwawancarai atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Peneliti menyusun pertanyaan dengan urut dan mengajukan pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan kepada Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pelaku usaha/ritel Kota Semarang, dan Masyarakat Kota Semarang.

3) Dokumentasi

Salah satu cara yang digunakan adalah dokumentasi yang mencakup kegiatan membaca, mengamati, mengumpulkan data relevan dengan focus penelitian serta menelaah. Dokumentasi merupakan suatu catatan terkait peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, terlewati atau lampau. Dalam metode ini, dokumen dapat berupa gambar, karya-karya monumental ataupun tulisan. Selain itu, metode ini juga sebagai salah satu cara pengumpulan data yang memakai data-data seperti catatan (dokumen) atau buku.

4) Studi Kepustakaan

Salah satu metode atau cara pengumpulan data yang banyak dilakukan dan dipakai yakni studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dari artikel ilmiah, berita, buku, sumber kredibel lainnya yang relevan dan memiliki kaitannya dengan topik penelitian. Pada studi pustaka juga dapat memperkuat latar belakang penelitian kita dilakukan dan membuat kita untuk memahami dan mendalami terkait penelitian-penelitian terdahulu. Sumber studi kepustakaan dapat berbentuk dokumen dan laporan dari permasalahan yang diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, analisis dan interpretasinya adalah

1. Pengumpulan Data

Hal ini dilakukan dalam sebagai bentuk upaya peneliti dalam mendapatkan data dan kebutuhan yang sesuai dengan hasil pengambilan suatu data.

2. Reduksi Data

Tahap ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mencari tema dan pola dengan merangkum beberapa hal penting. Dalam penelitian, reduksi data dilakukan karena sangat banyak data yang digunakan.

3. Penyajian Data

Tahap dalam teknik analisis data kualitatif yakni penyajian data yang juga merupakan suatu kegiatan ketika sekumpulan data secara tersusun dan mudah dimengerti, sehingga memungkinkan dapat menghasilkan kesimpulan. Bentuk yang dihasilkan dalam *data display* berbentuk matriks, grafik, hasil pencatatan dari lapangan atau bacaan bertulisan naratif, bagan atau jaringan. Dalam penyajian data ini, data-data nantinya akan diorganisasikan secara tersusun didalam pola hubungan sehingga nanti akan lebih mudah dimengerti.

4. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila pada tahap awal telah ditemukan bukti yang mendukung maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat dipertahankan pada akhir penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Mengenai penelitian implementasi kebijakan ini, kualitas data yang peneliti gunakan yakni triangulasi sumber data—dengan melibatkan informasi dari berbagai pihak seperti masyarakat dan instansi pemerintah terkait—untuk menguji keabsahan data dan memastikan kualitas data yang diperoleh.